

**PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
YANG MEMPUNYAI USAHA SYARIAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**DISERTASI**



**Oleh:**

**SYAHRIDA**

**NIM. 200311020077**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
BANJARMASIN  
PRODI DOKTOR ILMU SYARIAH  
1446H/2024**

**PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
YANG MEMPUNYAI USAHA SYARIAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Disertasi**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor  
Ilmu Syariah

**Oleh:**

**SYAHRIDA**

**NIM. 200311020077**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
BANJARMASIN  
PRODI DOKTOR ILMU SYARIAH  
1445H/2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangah di bawah ini :

Nama : SYAHRIDA  
NIM. : 200311020077  
Program Studi : S3 Ilmu Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul : **“Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Disertasi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



SYAHRIDA

## SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI

  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME  
1228/Un.14/IV/UPM-BP/10/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi **drillbit** pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini, kami menyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Syahrída
NIM	: 200311020077
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian TERBUKA.

Banjarmasin, 28 Oktober 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd  
NIP. 197105251997031006

**Halaman Persetujuan**  
**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM**  
**DOKTOR**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**SYAHRIDA**

**NIM. 200311020077**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk**  
**Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

**Pembimbing I**

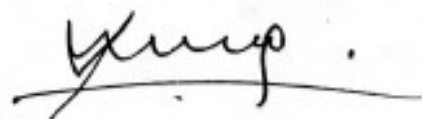


**Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.**

**NIP. 195512231982031001**

**Tanggal, Oktober 2024**

**Pembimbing II**



**Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.**

**NIP. 197408171998031005**

**Tanggal, Oktober 2024**




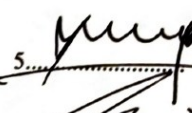
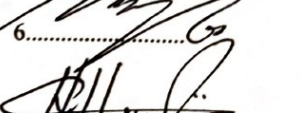


**PENGESAHAN DISERTASI**

**PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MEMPUNYAI  
USAHA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Disusun dan dipersembahkan oleh:**

**SYAHRIDA  
NIM. 200311020077**


**Telah diajukan kepada Dewan Penguji  
Pada hari Senin, tanggal 25 November 2024**

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. (Ketua/Penguji)	1. 
2. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. (Penguji Utama)	2. 
3. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Penguji)	3. 
4. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. (Penguji Eksternal)	4. 
5. Dr. Muhaimin, S. Ag., M.A. (Penguji)	5. 
6. Mujiburohman, M.A., Ph.D. (Penguji)	6. 
7. Dr. H. Nuril Khasyiin, Lc., M.A. (Penguji/ Sekertaris)	7. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



  
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.  
NIP. 197105251997031006

## ABSTRAK

SYAHRIDA, NIM. 200311020077: *Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* di bawah Bimbingan I: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. dan bimbingan II: Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2024).

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas Syariah, Prinsip Syariah, legislasi pendirian*

Seiring berkembangnya bisnis syariah, banyak persoalan yang terkait bentuk badan hukum Perseroan Terbatas itu sendiri. Banyak yang mempertanyakan bahwa kegiatan perbankan syariah dan lembaga keuangan non-banknya berlabel syariah, tetapi pada praktiknya sama saja dalam hal pengelolaannya dengan bank konvensional dan Lembaga keuangan non-bank konvensional. Atas permasalahan di atas, Peneliti telah melakukan penelitian untuk mengetahui problematika akad pada Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit usaha yang telah didirikan secara syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah klasik dan kontemporer, selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisis model atau pola akad dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit syariahnya yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, serta untuk mengetahui dan menganalisis transformasi pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan secara syariah ke dalam sistem legislasi hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif doktrinal menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara kepada praktisi ekonomi syariah yaitu diantaranya Koordinator DSN-MUI Perwakilan Kalimantan Selatan, Anggota DPS PT Jamkrida Kalsel, Anggota DPS PT Bank Kalsel dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Selatan.

Berdasarkan penelusuran pustaka dan hasil wawancara yang telah dianalisis dengan teori-teori hukum yang ada, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut: **pertama**, problematika pendirian pada Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit usaha yang telah didirikan secara syariah dalam tinjauan fikih klasik terdapat kerancuan dalam kedudukan pengelola pada Perseroan Terbatas yang hanya berisi pemodal, masih mengandung manajemen akad dalam pembentukan direksinya tidak menggunakan akad spesifik dan masih ada layanan konvensional meskipun telah terpisah pengelolaannya dan kedudukan DPS pada PT konvensional yang mempunyai usaha atau unit syariah hanya fokus kepada produk akad. **Kedua**, bahwa model atau pola pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit syariah yang ada masih berupa Perseroan Terbatas Konvensional dengan manajemen konvensional, sementara Perseroan Terbatas Syariah memiliki kekhususan dalam karakter akad syariah dan manajemen syariah dengan hubungan hukum sebagaimana akad pernikahan sehingga ada ijab

dan qabul. **Ketiga**, penerapan model Perseroan Terbatas Syariah dengan pendapat keagamaan DSN-MUI yang bertransformasi menuju sistem legislasi hukum nasional yang menerapkan *Shariah Governance* dalam model PT Syariah kedepannya.

Dalam penelitian ini, Peneliti merekomendasikan agar DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang Perseroan Terbatas konvensional yang meskipun sudah sesuai dengan ketentuan akad syirkah dalam Islam, agar disempurnakan dengan klausula “Perseroan Terbatas Syariah” dengan model manajemen akad dan selaras dengan istilah-istilah syariah, dengan demikian penyempurnaan prosedur pendirian PT hendaknya ditambahkan syarat sertifikat dari DSN-MUI tentang usaha syariah yang sudah pasti persyaratan terhadap usaha yang dijalankan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar, judi dan komoditas yang haram. Sebelum dimohon pendiriannya ke Menteri Hukum dan HAM (Dirjen AHU) di hadapan Notaris. Kalau yang belum mempunyai sertifikat usaha syariah dari DSN-MUI bisa diajukan setelah PT sah menjadi badan hukum, dengan mengubah Anggaran Dasar PT yang menyatakan bahwa PT tersebut adalah PT Syariah.



## ABSTRACT

SYAHRIDA, NIM. 200311020077: *The Establishment of a Limited Liability Company with Sharia Business in the Perspective of Islamic Economic Law* under the supervision of Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. and Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. at the Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin (2024).

**Keywords:** *Sharia Limited Liability Company, Sharia Principles, establishment legislation.*

Along with the development of sharia business, many problems have arisen related to the form of the Limited Liability Company legal entity itself. Many question how the activities of banking and non-banking financial institutions are labelled sharia, but in practice they are the same in terms of management as conventional institutions. Regarding the problems above, the researcher has conducted a scientific exploration to find out the problematic contracts in Limited Liability Companies that have sharia businesses or business units that have been established in accordance with sharia principles based on the perspective of classical and contemporary sharia economic law. Furthermore, to study and analyse the model or pattern of the contract in the establishment of the company, as well as to find out and analyse the transformation of such establishment into the national legal legislation system.

This study uses a normative doctrinal research method using several approaches, namely the statute approach, historical approach, conceptual approach, and comparative approach. Data were obtained from primary and secondary legal materials using literature studies and supported by interviews with sharia economic practitioners, including the Coordinator of the DSN-MUI Representative of South Kalimantan, Member of the Sharia Supervisory Council (DPS) at PT JAMKRIDA of South Kalimantan, Members of DPS at PT Bank KALSEL and the Chairperson of the Indonesian Notary Association (INI) of South Kalimantan.

Based on literature searches and interview results that have been analysed with existing legal theories, the following research results were found: *first*, there are problems in the establishment of the so-called Sharia Company, where there is confusion in the position of the organizational structure of a Limited Liability Company that only contains investors without mentioning the business operator; there are still conventional services even though their management has been separated from their conventional parent company; and the position of DPS which is similar to a conventional PT so that its function focuses on the product of the contract. *Second*, that the model or pattern of establishing a legal entity of a Limited Liability Company that has a sharia business or existing sharia unit is still a Conventional Limited Liability Company with conventional management, while a

Sharia Limited Liability Company has special characteristics in the character of sharia contracts and sharia management with legal relations such as marriage contracts so that there is *ijab* and *qabul*. *Third*, the application of the Sharia Limited Liability Company model with the religious decree of the DSN-MUI which is due to be transformed towards a national legal legislation system that applies Sharia Governance in the Sharia LLC model in the future.

In this study, the researcher recommends that the DSN-MUI issue a *fatwa* on conventional Limited Liability Companies, which although already in accordance with the provisions of the *syirkah* contract in Islam, should be improved with a clause "Sharia Limited Liability Company" with a contract management model and in line with sharia terms. Thus, the improvement of the PT establishment procedure should be added with a certificate requirement from the DSN-MUI regarding sharia business which is definitely free from elements prohibited by sharia such as usury, frauds, gambles and haram products. This step should be taken before the application for its establishment is submitted to the Minister of Law and Human Rights (Directorate General of AHU) through a Notary. For companies that do not yet have a sharia business certificate from the DSN-MUI, the certification can be submitted after the company has legally become a legal entity, by changing the Company's Articles of Association which states that the company is a Sharia Limited Liability Company.

## خلاصة

شهريد 200311020077: NIM. تأسيس الهيئة القانونية لشركة ذات المسؤولية المحدودة مع الأعمال التجارية الشرعية في منظور القانون الاقتصادي الشرعي، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج. أحمد فوزي عسيري، الماجستير، المشرف الثاني: الدكتور مهيمن، الماجستير، الدراسات العليا جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، (2024).

**الكلمات المفتاحية:** شركة ذات مسؤولية محدودة شرعية، مبادئ الشريعة، تشريع التأسيس.

مع تطور الأعمال التجارية الشرعية، هناك العديد من القضايا والمشاكل المتعلقة بشكل الهيئة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها. ويشكك الكثيرون في أن الأنشطة المصرفية الشرعية والمؤسسات المالية غير المصرفية التي توصف بالشرعية، لكنها في الممارسة العملية هي نفسها من حيث الإدارة مع البنوك التقليدية والمؤسسات المالية التقليدية غير المصرفية. وانطلاقاً من المشكلة السابقة، قامت الباحثة بإجراء بحث لمعرفة مشكلات العقود في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لها أعمال أو وحدات أعمال شرعية تم تأسيسها شرعاً من حيث القوانين الاقتصادية الشرعية التقليدية والمعاصرة، ثم دراسة وتحليل نموذج أو نمط العقود في تأسيس الهيئات القانونية للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لها أعمال أو وحداتها الشرعية وفقاً للقوانين الاقتصادية الشرعية، ومعرفة وتحليل تحول تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة المنفذة شرعاً إلى نظام التشريع القانوني الوطني.

استخدمت الباحثة في هذا البحث مزيجاً من البحث المعياري والعقائدي، مع اتباع المنهج القانوني (*statute approach*) والمنهج التاريخي (*historical approach*) والمنهج المفاهيمي (*conceptual approach*) والمنهج المقارن (*comparative approach*). وقد تم الحصول على البيانات من المواد القانونية الأولية والثانوية باستخدام الوثائق مدعومة بمقابلات مع ممارسي الاقتصاد الشرعي، بما في ذلك ممثل المجلس الوطني الشرعي - ممثل مجلس علماء إندونيسيا في جنوب كاليمانتان، وعضو المجلس الوطني الشرعي - شركة جامكريدا المحدودة في كاليمانتان الجنوبية، وعضو المجلس الوطني الشرعي - شركة البنوك المحدودة في كاليمانتان الجنوبية، ورئيس جمعية الموثقين الإندونيسيين (*INI*) في كاليمانتان الجنوبية.

واستناداً إلى نتائج الوثائق والمقابلات التي تم تحليلها مع النظريات القانونية القائمة، تم التوصل إلى نتائج البحث التالية أولاً: أن مشكلة العقود في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لها أعمال

أو وحدات أعمال تم تأسيسها وفقاً للشريعة في الفقه التقليدي، وتشير المراجعة الفقهية إلى أن هناك ارتباكاً في موقف المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تحتوي على مستثمرين فقط، وما زالوا يتضمنون إدارة العقود في تشكيل مجلس الإدارة، ولا يستخدمون عقوداً محددة ولا تزال هناك خدمات تقليدية على الرغم من أن الإدارة وموقع قائمة الناخبين منفصلان في حين أن الشركات التقليدية ذات المسؤولية المحدودة التي لديها أعمال أو وحدات متوافقة مع الشريعة تركز فقط على المنتجات التعاقدية. ثانياً: أن نموذج أو نمط تأسيس الهيئة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لها أعمال أو وحدات شرعية لا تزال شركة ذات مسؤولية محدودة تقليدية. ثالثاً: أهمية تطبيق نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشرعية بفتوى المجلس الوطني الشرعي - مجلس علماء إندونيسيا الذي تحول إلى نظام التشريع القانوني الوطني من خلال تطبيق الحوكمة الشرعية في نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشرعية في المستقبل.

ومن خلال هذا الباحث توصي الباحثة بأن يصدر المجلس الوطني الشرعي - مجلس علماء إندونيسيا فتوى بشأن الشركات التقليدية ذات المسؤولية المحدودة التي وإن كانت تتفق بالفعل مع أحكام العقد الشريفي في الشريعة الإسلامية، إلا أنه ينبغي تنقيح بند "الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشرعية" مع نموذج إدارة العقد بما يتوافق مع أحكام الشريعة، وبالتالي تحسين إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وينبغي إضافة شرط الحصول على شهادة من المجلس الوطني الشرعي - مجلس علماء إندونيسيا بشأن الأعمال التجارية الشرعية التي هي بالتأكيد شرط لخلو الأعمال التي تتم من عناصر محظورة شرعاً مثل الربا والغرر والقمار والسلع المحرمة. وقبل أن يتم طلب التأسيس إلى وزير القانون وحقوق الإنسان (المدير العام للإدارة القانونية العامة) بحضور كاتب العدل. إذا لم تكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة حاصلة بعد على شهادة أعمال شرعية من المجلس الوطني الشرعي - مجلس علماء إندونيسيا، فيمكن تقديمها بعد أن تصبح الشركة ذات المسؤولية المحدودة هيئة قانونية، وذلك بتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة لينص على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة شرعية.

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta para sahabat, kerabat, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tiada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terimakasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terimakasih ini terutama Penulis haturkan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Terimakasih atas segala bimbingan dan perhatian yang diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. selaku pembimbing dalam penulisan disertasi ini. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, masukan ilmunya dan kesediaan meluangkan waktu dalam pembimbingan disertasi Penulis selama ini.
4. Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. selaku pembimbing dalam penulisan disertasi ini, sekaligus Koordinator DSN-MUI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, masukan ilmunya dan kesediaan meluangkan waktu dalam pembimbingan disertasi Penulis selama ini.

5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum selaku pembimbing eksternal dalam penulisan disertasi ini. Terimakasih atas bimbingan dan perhatian yang diberikan selama ini.
6. Bapak Mujiburohman, M.A., Ph.D. selaku ketua Jurusan S3 Ilmu Syariah dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA selaku Sekretaris Jurusan S3 Ilmu Syariah beserta seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu pada Program Pascasarjana ini.
7. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. yang telah memberikan Izin Belajar melanjutkan program Doktor di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
8. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M. Hum selaku Dewan Pengawas Syariah pada PT. Jamkrada Syariah Kalimantan Selatan.
9. Bapak H. Darul Quthni selaku Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah.
10. Bapak Notaris Raden Sukoco selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Selatan periode 2019-2023.
11. Bapak Arif Ramadhan Kepala Bagian Manajemen Resiko, Subrogasi dan Klaim di PT Jamkrada dan Bapak Khairul Imam Staf Legal PT Jamkrada Kalimantan Selatan.
12. Ibu Varida Megawati Simarmata dan Zahro Ubaydilla Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalimantan Selatan.
13. Kantor Notaris Nur Alia, S.H., M.Kn. dan Kerina Maulidya, S.H., M.Kn. atas waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.
14. Keluarga besar Penulis yang turut serta memotivasi penulis dan pengertian yang diberikan selama penulisan disertasi ini. Terkhusus kepada orangtua tercinta, Abah H. Mursidi Arsyad (Almarhum) dan Mama Hj. Siti Aisyah serta

Abah Mertua H. Rizali Hamdi (Almarhum) dan Mama Mertua Gusti Masbandarwati (Almarhum).

15. Kepada suami tercinta Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S. Sos., M. Si dan anakku tersayang Meydina Inayyah, S. Farm., Putri Ramadhaniah dan M. Dapa Anugrah.
16. Terimakasih untuk adik-adik tercinta dukungan dan doanya, Nadia Dharma Pratiwi, S.H. dan suaminya Luthfi Shabana, S.H. dan M. Akbar, S.H. M.Kn. serta Kaka ipar tercinta Hj. Liliana dan H. Suriansyah dan adik ipar tercinta Hj. Lili Arini
17. Semua teman-teman Kelas Ilmu Syariah Angkatan 2020 atas dukungan, doa dan kebersamaan dalam perjuangan, terimakasih.

Penulis menyadari disertasi yang telah dihasilkan ini, masih banyak kekurangannya dan dengan segenap hati memohon kepada para pembaca demi kesempurnaan disertasi ini untuk dikoreksi, dan atas koreksinya disampaikan terima kasih. Penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal 'alamin.

**Banjarmasin, November 2024**

Penulis,

**SYAHRIDA**

NIM. 200311020077

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Sumber:**

**SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

## DAFTAR SINGKATAN

PT	: Perseroan Terbatas
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
BUK	: Bank Umum Konvensional
BUS	: Bank Umum Syariah
UUS	: Unit Usaha Syariah
LBS	: Lembaga Bank Syariah
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
BI	: Bank Indonesia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BUK	: Bank Umum Konvensional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	: Bank Perkreditan Rakyat Syariah
GWM	: Giro Wajib Minimum
RIM	: Rasio Intermediasi Makroprudential
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
LLC	: <i>Limited Liability Corporation</i>
GIEI	: <i>Global Islamic Economy Indicator</i>

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SGF	: Shariah Governance Framework
IFI	: <i>Islamic Financial Institution</i>
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
WPGS	: Working Group Perbankan Syariah
DPbS	: Direktorat Perbankan Syariah
BSI	: Bank Syariah Indonesia
SC	: <i>Shariah Committee</i>
BNM	: Bank Negara Malaysia
SAC	: <i>Shariah Advisort Council</i>
KNEKS	: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
PERSETUJUAN DISERTASI .....	iv
PENGESAHAN DISERTASI .....	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xxvi
DAFTAR ISI .....	xxiv
DAFTAR BAGAN .....	xxivvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikasi Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional/Istilah .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	22
G. Metode Penelitian .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	39
BAB II ASPEK TEORITIS PENGKAJIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MEMPUNYAI USAHA SYARIAH DENGAN KERANGKA <i>GRAND, MIDDLE DAN OPERASIONAL THEORY</i>	
A. Teori Negara Hukum dan Maqashid Syariah (Teori Al-Maslahah Al Mursalah) .....	41
1. Teori Negara Hukum .....	41
2. Teori Maqashid Syariah .....	47
B. Teori Legislasi dan Istinbath Hukum .....	55
1. Teori Legislasi .....	55
2. Teori Istinbat Hukum .....	65
C. Teori Badan Hukum Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam .....	69
1. Teori Badan Hukum Menurut Hukum Barat .....	69
2. Teori Badan Hukum Menurut Hukum Islam .....	79

D. Teori Syirkah.....	84
1. Hukum Akad dalam Syariah .....	88
E. Teori Perubahan Hukum Ibnul Qayyim Al Jauzi .....	89
F. Konsep Fatwa DSN-MUI .....	96
G. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan <i>Shariah Governance (SG)</i> .....	112

### BAB III PROBLEMATIKA DAN FORMULASI MODEL PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MEMPUNYAI USAHA SYARIAH ATAU UNIT USAHA SYARIAH YANG DISESUAIKAN PADA HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Landscape Keuangan Syariah Indonesia Dari Tahun ke Tahun....	120
B. Aspek Hukum Perdata tentang Pendirian Perseroan Terbatas.....	127
1. Tinjauan Aspek Hukum Perdata tentang Pendirian PT .....	148
2. Tinjauan Aspek Filosofis Dalam Pendirian PT Syariah .....	135
a) Filosofi Syariah Dalam Usaha .....	135
b) Filosofi PT Dalam Islam .....	137
c) Filosofi Pendirian Usaha dan Kesejahteraan Sosial .....	146
C. Urgensi Pendirian Perseroan Terbatas Syariah ditinjau dari Teori Perubahan Hukum.....	148
1. Transformasi Muamalat Kontemporer dan Kaitannya dengan Pendirian PT Syariah.....	148
2. Telaah Akad dalam Perseroan Terbatas Syariah .....	163
D. Model Akad Pendirian Badan Hukum PT Yang Mempunyai Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah Yang Disesuaikan Pada Hukum Ekonomi Syariah.....	174
1. Model Akad Pendirian Seperti Hukum Perkawinan Islam.....	175
2. Model Akad Pendirian Elaborasi Dari Praktik yang Sudah Ada di Indonesia .....	183
E. Perbandingan Bentuk <i>Shariah Governance</i> Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia .....	195

### BAB IV TRANSFORMASI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKSANAKAN SECARA SYARIAH KE SISTEM LEGISLASI HUKUM NASIONAL

A. Prinsip-prinsip Akad pada Perseroan Terbatas yang Mempunyai Usaha Syariah atau Unit Usaha yang Didirikan Secara Syariah	
---	--

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Klasik dan Kontemporer .....	202
1. Kedudukan Pengelola dalam Perseroan Terbatas .....	215
2. Manajemen Akad dalam Perseroan Terbatas Syariah.....	222
3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam PT yang Mempunyai Usaha Syariah .....	227
4. Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah yang Diawasi oleh DPS .....	227
B. Sistem Legislasi Hukum Nasional yang Dapat Mengakomodasikan Pendirian Perseroan Terbatas Syariah. ....	241
C. Implementasi Operasional Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) Pada Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah Yang Didirikan Secara Syariah.....	253
 BAB V PENUTUP .....	268
A. Simpulan.....	268
B. Rekomendasi .....	270
 DAFTAR PUSTAKA.....	272
LAMPIRAN .....	282
Lampiran 1 Instrumen Pertanyaan Wawancara .....	282
Lampiran 2 Perubahan Akta Pendirian PT Jamkrida, yang Ada Unit Usaha Syariah .....	283
Lampiran 3 Perubahan Akta Pendirian PT BSI .....	298
Lampiran 4 Wawancara Penelitian .....	309
A. Wawancara dengan Koordinator DSN-MUI Perwakilan Provinsi Kalsel .....	309
B. Wawancara dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan.....	309
C. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel.....	310
D. Wawancara dengan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kalsel .....	310
E. Wawancara dengan PT. Jamkrida Syariah Kalsel .....	311
F. Wawancara dengan Notaris Nur Alia, S.H., M.Kn.....	311
G. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah PT. Jamkrida Syariah Kalsel .....	312
Lampiran 5 Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis .....	313
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Penulis .....	319

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir Metode Yuridis Normatif .....	30
Bagan 2 Kerangka Konseptual Teoritik Penelitian .....	38
Bagan 3 Proses Pembuatan Undang-Undang .....	58
Bagan 4 Institusi Industri Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2022 .....	121
Bagan 5 Perbedaan Pokok antara Akad dan Perjanjian .....	207
Bagan 6 Perbandingan Perjanjian Berdasarkan Hukum Positif dengan Konsep Syariah .....	209
Bagan 7 Konsep Perbedaan Akad pada PT Konvensional dan PT Syariah .....	225
Bagan 8 Konsep PT Syariah dan Perbandingannya dengan PT Konvensional yang Mempunyai Usaha/Unit Syariah .....	226
Bagan 9 Perbedaan Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris .....	230
Bagan 10 Kasus Pelanggaran Lembaga Keuangan Syariah .....	230
Bagan 11 Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang Mempunyai Usaha Syariah .....	238
Bagan 12 Skema Mekanisme Kerja DSN-MUI .....	252
Bagan 13 Pemegang Peran Kunci dalam <i>Corporate Good Governance</i> Lembaga Keuangan Syariah .....	256
Bagan 14 Gambaran Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah pada PT BSI Tahun 2022 .....	260